



Analisis Tax Buoyancy pada Asean-5 Tahun 2002-2016

Dewi Setyoningrum^{1✉}, Evi Yulia Purwanti²

Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i2.39295>

Received: December 2019 ; Accepted: March 2020 ; Published: June 2020

Abstract

The fiscal deficit in developing countries is a major problem that has prompted government efforts to increase tax revenues. There is a positive relationship between tax and PDB. With tax buoyancy, the total response of tax revenue to changes in PDB can be measured by policy changes in the tax or administrative system. This study aims to identify analysis of tax buoyancy in ASEAN-5 countries (Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand) in 2002-2016. The analysis method in this study uses panel data regression analysis. Panel data regression analysis with the Common Effect Model method is used to analyze the influence of the share of manufacturing sector, share of agricultural sector, share of import sector, share of service sector, budget deficit, corruption, and tax reform to tax buoyancy in ASEAN-5 countries (Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand) in 2002-2016. The data used in this research is secondary data. The panel data regression results show that share of manufacturing sector, share of import sector, share of service sector, budget deficit, corruption, and tax reform have a significant effect to tax buoyancy. The share of manufacturing sector with a coefficient of 1.30 as dominant factor affecting tax buoyancy. While for the share of agricultural sector has a coefficient -0.60 and insignificant effect on tax buoyancy in ASEAN-5 countries (Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand) in 2002-2016.

Keywords: budget deficit , tax buoyancy, tax revenue, gross domestic product

Abstrak

Defisit fiskal di negara-negara berkembang adalah masalah besar yang mendorong upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak. Ada hubungan positif antara pajak dan PDB. Dengan daya apung pajak, total respons penerimaan pajak terhadap perubahan dalam PDB dapat diukur dengan perubahan kebijakan dalam sistem perpajakan atau administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi analisis daya apung pajak di negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) pada tahun 2002-2016. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel dengan metode Common Effect Model digunakan untuk menganalisis pengaruh pangsa sektor manufaktur, pangsa sektor pertanian, pangsa sektor impor, pangsa sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi pajak terhadap kemampuan pajak di Negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) pada tahun 2002-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa pangsa sektor manufaktur, pangsa sektor impor, pangsa layanan sektor, defisiensi anggaran, korupsi, dan reformasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya apung pajak. Pangsa sektor manufaktur dengan koefisien 1,30 sebagai faktor dominan yang mempengaruhi pajak apung. Sedangkan untuk pangsa sektor pertanian memiliki koefisien -0,60 dan pengaruh tidak signifikan tentang daya apung pajak di negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) pada tahun 2002-2016.

Kata Kunci: defisit anggaran, pajak apung, pendapatan pajak, produk domestik bruto

How to Cite: Setyoningrum, D., & Purwanti, E. (2020). Analisis Tax Buoyancy pada Asean-5 Tahun 2002-2016. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(2), 741-750. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i2.39295>

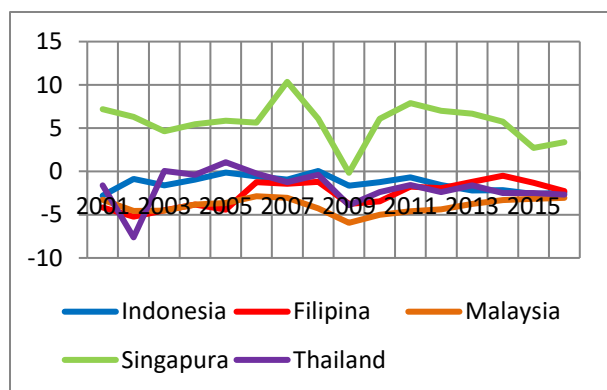
PENDAHULUAN

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan organisasi geo-politik dan ekonomi antar negara di negara Asia Tenggara. Dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan ditanda tangani oleh lima wakil pemerintahan Asia Tenggara. Prasetyo (2016) menyatakan bahwa negara ASEAN merupakan blok baru ekonomi dunia dengan anggota negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara terdiri dari sepuluh negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam. Dimana kekuatan ekonomi di negara ASEAN berada pada lima negara yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Negara-negara tersebut dikatakan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan dikenal juga dengan ASEAN-5.

Menurut laporan dari World Economic Forum (WEF) lima negara yang disebut dengan ASEAN-5 secara konstan menempati peringkat 60 teratas daya saing negara-negara dunia berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) menurut 12 pilar. Salah satunya adalah kondisi stabilitas makroekonomi suatu negara, yang di dalamnya meliputi kategori debt coverage ratio, government budget balance, gross national savings, inflation, foreign debt, and hysteresis indicator.dari tahun 2014 sampai 2018.

Pokok permasalahan yang terjadi pada negara-negara berkembang belakangan ini salah satunya adalah defisit anggaran. Alasan di balik besarnya ketidakseimbangan fiskal ini diakibatkan karena ekspansi pengeluaran yang terlalu cepat dan tidak diimbangi dengan pengumpulan pendapatan negara yang tinggi. Begitu pula dengan kondisi perekonomian

negara ASEAN-5, dimana mayoritas negaranya memiliki kondisi anggaran yang pengeluaran pemerintahanya lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajaknya atau defisit.



Gambar 1. Budgetary Central Government Negara ASEAN-5 Tahun 2001-2016 (percent of PDB)

Sumber : International Monetary Fund (IMF), 2018

Dari gambar 1 sejak tahun 2001 sampai 2016 Singapura secara konstan berada pada kondisi surplus anggaran, kecuali di tahun 2009. Defisit anggaran negara Singapura tahun 2009 ini merupakan cara peningkatan pada stimulus fiskal untuk meningkatkan investasi di negaranya sehingga di tahun berikutnya kondisi anggaran pemerintahanya kembali surplus. Di tahun 2001 defisit anggaran tertinggi berada pada negara Filipina sebesar -4,17 persen, Malaysia dengan -3,26 persen, Indonesia sebesar -2,8 persen, dan terakhir Thailand sebesar -1,63 persen.

Model pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer (1986) telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan mengurangi ketidakseimbangan fiskal, baik dengan menurunkan pengeluaran atau meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga dalam mengatasi

permasalahan defisit anggaran tersebut Pemerintah melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai reformasi tata kelola pajak dan optimalisasi penerimaan pajak dengan meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak pada masyarakat. Sehingga keberhasilan kinerja penerimaan pajak nantinya dapat terlihat melalui nilai tax buoyancy.

Tingkat responsivitas penerimaan pajak terhadap perkembangan PDB suatu negara merupakan variabel penting dalam memproyeksikan penerimaan pajak. Menurut Jenkins et al.(2000) tax buoyancy adalah indikator untuk mengukur respon dari total penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional. Total responsivitas tersebut memperhitungkan peningkatan pendapatan dan perubahan diskresioner yaitu, tarif pajak dan basis pajak yang dibuat oleh otoritas pajak dalam sebuah sistem pajak.

Tabel 1. Perkembangan Tax buoyancy Negara ASEAN-5 Tahun 2012-2016 (dalam persen)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016
Indonesia	1,20	0,92	0,61	0,92	0,46
Filipina	1,45	1,34	1,23	1,03	1,04
Malaysia	1,80	0,59	0,63	0,17	0,39
Singapura	1,81	0,42	1,59	0,50	2,23
Thailand	0,36	2,92	-2,38	1,65	0,41
Rata-rata tax buoyancy	1,32	1,24	0,34	0,85	0,91

Sumber : World Bank, 2018 (data diolah)

Wijayanti (2010) menyatakan bahwa nilai buoyancy pajak yang lebih kecil dari satu mengindikasikan elastisitas pajak yang rendah

dan tidak efektifnya perubahan diskresioner, sedangkan nilai buoyancy pajak yang lebih besar dari satu mengindikasikan perubahan diskresioner meningkatkan penerimaan pajak. Nilai tax buoyancy pada ASEAN-5 cenderung masih berfluktuatif. Di tahun 2012 nilai tax buoyancy Indonesia dan Thailand berada di bawah nilai rata-rata tax buoyancy ASEAN-5. Kemudian di tahun 2013, negara dengan nilai tax buoyancy yang berada di bawah nilai rata-rata tax buoyancy ASEAN-5 bertambah menjadi tiga negara yaitu, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, sedangkan sisanya berada di atas nilai rata-rata tax buoyancy.

Di tahun 2014 hanya negara Thailand dengan nilai tax buoyancy yang negatif dan di bawah nilai rata-rata tax buoyancy ASEAN-5. Hal ini dikarenakan Thailand mengalami penurunan tax revenue dan PDB di tahun 2014. Selanjutnya, untuk negara dengan nilai tax buoyancy yang berada di atas rata-rata tax buoyancy ASEAN-5 pada tahun 2015 adalah negara Indonesia, Filipina, dan Thailand, sedangkan di tahun 2016 hanya negara Filipina dan Singapura.

Menurut Ahmed (2010) dalam penelitiannya berjudul "Determinant of Tax Bouyancy: Empirical Evidence from Developing Countries" menyatakan bahwa faktor-faktor penentu besarnya tax buoyancy dapat dilihat melalui variabel sektor manufaktur, sektor pertanian, sektor impor, sektor moneter, sektor jasa, defisit anggaran, dan hibah. Dalam penelitiannya tersebut dijelaskan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara sektor impor, sektor manufaktur, sektor jasa, sektor moneter, dan defisit anggaran terhadap tax buoyancy.

Sedangkan untuk pertumbuhan hibah berpengaruh negatif terhadap tax buoyancy. Sementara itu, sektor pertanian sendiri tidak memiliki pengaruh terhadap tax buoyancy di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan bahwa pada sektor pertanian masih sulit untuk dikenakan pajak, baik untuk komoditas pertaniannya maupun petaninya.

Gupta (2007) dalam penelitiannya berjudul "Determinants of Tax Revenue Effort in Developing Countries" juga menjelaskan bahwa diantara faktor-faktor kelembagaan, korupsi merupakan variabel yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pendapatan negara. Dengan tingginya kasus korupsi pada negara-negara berkembang hal ini dapat mengurangi penerimaan pajak negara akibat semakin rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis secara parsial pengaruh share sektor manufaktur, share sektor pertanian, share sektor impor, share sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi perpajakan terhadap tax buoyancy di negara ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) tahun 2002-2016.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai variabel-variabel yang telah diidentifikasi, sehingga diketahui pemaparan yang lebih jelas. Variabel Dependen (Y), tax buoyancy merupakan indikator tingkat efisiensi dan responsivitas mobilisasi penerimaan pajak dalam menanggapi pertumbuhan pendapatan nasional (PDB). Tax buoyancy sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan

perbandingan persentase perubahan dari total penerimaan pajak terhadap persentase PDB negara ASEAN-5 selama kurun waktu 2002-2016 dalam satuan persen. Share sektor manufaktur (X_1), mencerminkan kontribusi dari seluruh kegiatan produksi ekonomi dalam pengolahan suatu barang dasar sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi yang dinyatakan dalam persen.

Share sektor pertanian (X_2), merupakan kontribusi dari seluruh komoditas-komoditas pertanian dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang dinyatakan dalam persen. Share sektor impor (X_3), merupakan kontribusi dari seluruh kegiatan ekonomi transportasi barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri secara legal dalam perdagangan internasional dengan satuan persen.

Share sektor jasa (X_4), dalam penelitian ini share sektor jasa dinyatakan dalam satuan persen. Share sektor jasa adalah kontribusi dari seluruh kegiatan produksi jasa yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah yang terdapat dalam sub sektor jasa swasta dan jasa pemerintahan. Defisit anggaran (X_5), diperoleh dari selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dengan penerimaan dari pajak dan dinyatakan dalam persen.

Korupsi (X_6), mencerminkan tindakan dalam memanfaatkan kekuasaan dari jabatan publik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Dalam penelitian ini korupsi diukur dengan indeks control of corruption (COC). Besarnya nilai control of corruption antara -2,5 hingga 2,5. Reformasi Perpajakan

(X7), Merupakan perubahan yang mendasar dalam segala aspek perpajakan. Variabel reformasi perpajakan diukur dengan dummy, dimana proxy 0 menyatakan data sebelum adanya reformasi perpajakan di negara ASEAN-5. Sedangkan nilai 1 menyatakan data setelah adanya reformasi di negara ASEAN-5.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data jenis ini merupakan data yang terdiri atas sekumpulan subjek penelitian sepanjang periode tertentu, penggabungan antara data time series dari tahun 2002-2016 dan data cross section 5 negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari World Bank. dan International Monetary Fund (IMF) meliputi data penerimaan pajak, PDB, share sektor manufaktur, share sektor pertanian, share sektor jasa, share sektor impor, defisit anggaran, dan korupsi dari tahun 2002-2016. Sedangkan data reformasi perpajakan diperoleh dari dummy variabel sebelum dan sesudah adanya reformasi perpajakan di negara ASEAN-5.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penentu tax buoyancy di negara ASEAN-5. Model persamaan yang akan diestimasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TB_{it} = \beta_0 + \beta_1 MANFit + \beta_2 AGRit + \beta_3 IMPit + \beta_4 SERit + \beta_5 BDit + \beta_6 KORit + \beta_7 DRPit + \mu_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- i : cross section
- t : time series
- β_0 : konstanta
- $\beta_{1,2..n}$: koefisien variabel independen
- TBit : Tax Buoyancy
- MANFit : Share Sektor Manufaktur
- AGRit : Share Sektor Pertanian
- IMPit : Share Sektor Impor
- SERit : Share Sektor Jasa
- BDit : Defisit Anggaran
- KORit : Korupsi
- DRPit : Reformasi Perpajakan
- μ_{it} : Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Terbaik

Dalam analisis regresi data panel digunakan beberapa tahapan untuk memilih model regresi terbaik. Pemilihan model tersebut meliputi, common effect model, fixed effect model, dan random effect. Untuk uji random effect model dalam penelitian ini tidak dapat digunakan karena keterbatasan jumlah cross section yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan data variabel yang dipilih dalam penelitian. Uji pemilihan model terbaik dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model regresi data panel yang paling cocok digunakan untuk menguji hipotesis model penelitian yang telah dikembangkan. Berdasarkan hasil Uji F-restricted diperoleh

hasil bahwa model *common effect* adalah model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Asia Tenggara merupakan negara di benua Asia bagian tenggara yang mencakup Indochina, Semenanjung Malaya, dan kepulauan di sekitarnya. Luas negara Asia Tenggara kurang lebih 4.500.000 km². Negara yang paling luas adalah Indonesia, yaitu 1.919.443 km². Sedangkan untuk negara yang memiliki wilayah paling sempit adalah Singapura dengan luas wilayah hanya 721,5 km². Di 2016 negara Indonesia juga memiliki angka PDB tertinggi dibandingkan dengan keempat negara ASEAN lainnya, yaitu sebesar 103.7863 miliar US\$. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki kondisi pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara juga didukung oleh kontribusi dari masing-masing sektor ekonomi terhadap PDB. Berdasarkan data dari World Bank (2018), di negara ASEAN-5 selama tahun 2002-2016 negara Indonesia memiliki share sektor pertanian tertinggi yaitu 16,32. Hal ini dikarenakan negara Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang luas dan sebagian dari penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sedangkan negara Singapura hanya memiliki share sektor pertanian sebesar 0,03 persen. Selain itu, share sektor manufaktur negara Indonesia juga memiliki nilai yang tinggi sebesar 31,95 persen. Sedangkan untuk share sektor manufaktur terhadap PDB terendah berada di negara Singapura sebesar 17,26 persen di tahun 2013. Kegiatan impor dalam perdagangan internasional juga memiliki peran penting

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Melalui tarif dan bea impor, maka penerimaan pajak dari kegiatan impor akan meningkat. Selama tahun 2002-2016 negara Indonesia memiliki share sektor impor terendah sebesar 18,32 persen di tahun 2016. Selanjutnya, pada share sektor jasa tertinggi ada pada negara Singapura dengan angka 70,99 persen di tahun 2013. Selain memiliki share sektor jasa tertinggi, negara Singapura sebagai negara maju pada negara ASEAN-5 ini memiliki angka pengendalian korupsi tertinggi yaitu 2,33 persen di tahun 2013.

Reformasi perpajakan dalam analisis tax buoyancy ini sangat diperlukan. Di negara ASEAN-5 reformasi perpajakan tersebut berkaitan dengan tarif pajak PPh Badan. Peningkatan dan penurunan ini dilakukan untuk menarik investasi sehingga nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan pajak PPh Badan. Filipina memiliki tariff PPh Badan sebesar 30 persen, sedangkan Singapura saat ini menerapkan tariff PPh Badan sebesar 17 persen.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model terbaik yaitu *common effect model*. Data yang diolah adalah data panel dengan objek penelitian negara-negara yang tergabung dalam ASEAN-5, yaitu: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam kurun waktu 2002-2016. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu tax buoyancy yang terdiri dari variabel share sektor manufaktur, share sektor pertanian, share sektor impor, share sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi

perpajakan. Berdasarkan hasil regresi data panel pada tabel 2, maka diperoleh model dari penelitian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} TBit = & 1,070430 + 1,309344MANFit^* - \\ & 0,602356AGRit + 0,656935IMPit^* + \\ & 0,375753SERit^* + 0,844317BDit^* - \\ & 26,22486KORit^* + 0,551041DRPit^* + \mu it \dots \dots (2) \end{aligned}$$

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.070430	0.373217	2.868120	0.0055
MANF	1.309344	0.171955	7.614467	0.0000
AGR	-0.602356	0.498980	-1.207174	0.2316
IMP	0.656935	0.062426	10.52343	0.0000
SER	0.375753	0.099156	3.789533	0.0003
BD	0.844317	0.361865	2.333237	0.0226
KOR	-26.22486	3.669983	-7.145770	0.0000
DRP	0.551041	0.474200	2.162043	0.0493
R-squared	0.780507	F-statistic	34.03551	
Adjusted		Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber : Data Diolah

Hasil regresi data panel menghasilkan nilai R-squared sebesar 0.780507. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 78,05 persen variabel tax buoyancy dalam model dipengaruhi oleh variabel bebas dari share sektor manufaktur, share sektor pertanian, share sektor impor, share sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi perpajakan. Sementara sisanya sebesar 21,95 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti. Selanjutnya, berdasarkan uji signifikansi secara simultan variabel share

sektor manufaktur, share sektor pertanian, share sektor impor, share sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel tax buoyancy. Uji signifikansi secara parsial dari hasil regresi data panel memberikan hasil bahwa variabel share sektor manufaktur, share sektor impor, share sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap variabel tax buoyancy. Sedangkan untuk variabel share sektor pertanian tidak memiliki pengaruh terhadap variabel tax buoyancy.

Berdasarkan pada tabel 2, variabel share sektor manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax buoyancy di negara ASEAN-5. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ahmed (2010), dan Bayu (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pada sektor manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax buoyancy. Semakin tinggi pertumbuhan sektor manufaktur serta kontribusinya terhadap PDB melalui pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, cukai, serta pajak penghasilan dari perusahaan-perusahaan manufaktur, maka akan meningkatkan kinerja penerimaan pajak negara (tax buoyancy). Besarnya angka kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB ini juga dikarenakan semakin banyaknya perusahaan industri manufaktur di negara ASEAN-5 salah satunya Indonesia.

Share sektor impor juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax buoyancy negara ASEAN-5. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmed (2010), Bayu (2015), dan Sanjaya (2014) yang menunjukkan bahwa sektor impor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax buoyancy. Dalam

perdagangan internasional pengenaan pajak lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan aktivitas domestik. Tingginya kontribusi sektor impor di negara ASEAN-5 ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan sektor jasa maupun sektor manufaktur industri yang masih tergantung pada bahan baku impor. Sehingga hal ini menunjukkan adanya kontribusi secara positif dari tarif impor dan bea masuk terhadap total penerimaan pajak.

Setelah terjadinya krisis keuangan Asia pada tahun 1997, pertumbuhan sektor jasa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sektor manufaktur. Dalam penelitian ini nilai variabel share sektor jasa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tax buoyancy di negara ASEAN-5 dengan nilai koefisien sebesar 0,37. Sektor jasa tersegmentasi ke dalam beberapa sub sektor, diantaranya adalah pedagang besar dan kecil (termasuk hotel dan restoran), transportasi, pemerintahan, keuangan, layanan profesional dan layanan personal baik itu seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa real estate. Sehingga dengan semakin berkembangnya sektor perbankan dan keuangan, telekomunikasi, transportasi, dan logistik di negara-negara ASEAN-5 hal ini mampu mendorong peningkatan pada kinerja pemungutan pajak terutama melalui pajak langsung.

Defisit anggaran memiliki arah positif dan berpengaruh terhadap tax buoyancy di negara ASEAN-5. Ahmed (2010) menyatakan bahwa negara berkembang yang memiliki defisit anggaran tinggi hal ini akan mendorong upaya fiskal pemerintah dalam pengumpulan pajak negara. Sesuai dengan penelitian Bayu (2015) yang menunjukkan bahwa defisit anggaran memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap tax buoyancy. Ketika defisit anggaran pada negara ASEAN-5 tinggi maka akan terjadi perubahan yang signifikan dalam tarif pajak serta penegakan kebijakan yang berhubungan dengan pajak.

Variabel korupsi memiliki arah negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tax buoyancy di negara ASEAN-5. Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Gupta (2007) dalam penelitian yang berjudul "Determinants of Tax Revenue Effort in Developing Countries" yang menunjukkan bahwa korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja pendapatan suatu negara. Ditambah dengan Christianto (2014) yang menyebutkan bahwa dengan adanya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak atau kasus korupsi pajak lainnya ini mampu menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak.

Sehingga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan menyebabkan negara menjadi kehilangan potensi penerimaan dari sektor perpajakan dalam jumlah yang besar. Terdapat arah hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan antara variabel reformasi perpajakan terhadap tax buoyancy di negara ASEAN-5. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widjaya (2008) yang menyebutkan bahwa ada pengaruh signifikan antara reformasi perpajakan terhadap kinerja penerimaan pajak. Sejalan dengan teori Kurva laffer dalam model Leviathan, bahwa total penerimaan pajak yang maksimum tidak selalu dengan adanya pengenaan tarif pajak yang tinggi. Melainkan dengan pengenaan pajak yang rendah dan dikombinasikan dengan struktur pajak yang mampu meminimalkan penghindaran pajak.

Berdasarkan data dari Trading Economics (2018) Indonesia sebagai negara berkembang mulai melakukan penurunan tarif PPh badan di tahun 2009 menjadi 28 persen. Kemudian kembali lagi melakukan penurunan tarif PPh badan menjadi 25 persen. Indonesia melakukan perubahan reformasi pajak 2008 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menjelaskan adanya pengenaan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Dengan adanya reformasi perpajakan melalui tarif pajak yang baru ini, maka diharapkan wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak menjadi meningkat.

Setelah adanya reformasi perpajakan pada negara ASEAN-5 yang berkaitan dengan penurunan tarif PPh Badan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah negara Indonesia. Berdasarkan data dari World Bank (2018), negara ASEAN-5 cenderung mengalami peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai 2016. Penerimaan pajak tertinggi ada di negara Indonesia, tahun 2012 penerimaan pajaknya sebesar 68.606.786.635 US\$, kemudian di tahun 2016 menjadi 89.693.481.035 US\$.

SIMPULAN

Menggunakan analisis regresi data panel selama tahun 2002 sampai dengan 2016, penelitian ini menunjukkan bahwa hanya share sektor pertanian yang tidak berpengaruh terhadap tax buoyancy di negara ASEAN-5. Hal ini dikarenakan pada sektor pertanian terutama di negara-negara berkembang masih sulit untuk dilakukan pengenaan pajak pada

komoditas pertaniannya. Selain itu, mayoritas petani di negara berkembang yang tergabung dalam ASEAN-5 tersebut didominasi oleh sejumlah petani yang masih beroperasi secara tradisional.

Tentunya dengan kondisi ekonomi yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga sulit untuk dilakukan pengenaan pajak pada subjek pajak pada sektor pertanian. Sedangkan untuk variabel share sektor manufaktur, share sektor impor, share sektor jasa, defisit anggaran, korupsi, dan reformasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tax buoyancy negara ASEAN-5. Dengan adanya peningkatan dari masing-masing kontribusi sektor ekonomi hal tersebut dapat meningkatkan tax buoyancy negara ASEAN-5. Secara berurutan, share sektor manufaktur meningkat sebesar 1,30 persen, share sektor impor 0,65 persen, share sektor jasa 0,37 persen, defisit anggaran 0,84 persen, reformasi perpajakan sebesar 0,55 persen, dan terakhir variabel korupsi dengan arah negatif sebesar -26,22 persen dapat mempengaruhi tax buoyancy.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka disarankan bagi Pemerintah dan institusi terkait untuk membuat kebijakan baru mengenai sosialisasi pajak bagi petani-petani kecil di negara berkembang yang memiliki kontribusi terhadap PDB cukup tinggi seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Serta meningkatkan perhatian pada transaksi-transaksi yang sampai saat ini belum dikenakan pajak khususnya pada komoditas tertentu hasil dari sektor pertanian sehingga mampu meningkatkan kinerja penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Qazi Masood and Muhammad Suleiman. 2010. Determinants of Tax buoyancy: Empirical Evidence from Developing Countries. *European Journal of Social Sciences*, Vol. 13 (3), pp. 408-414.
- Bayu, Tedele. 2015. Analysis of Tax buoyancy and Its Determinants in Ethiopia (Cointegration Approach). *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 6, No.3.
- Christianto, Valentinus. 2014. Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 13, No.1 (2014).
- Gupta, Abhijit Sen. 2007. Determinants of Tax Revenue Efforts in developing Countries. IMF Working Paper 07/184. Washington: International Monetary Fund.
- Hyman, David N. 2010. *Public Finance : A Contemporary Application of Theory to Policy*. 10 ed. Thomson South Western: USA.
- International Monetary Fund. 2016. Budgetary Central Government. Diakses 05 Agustus 2018, dari <http://databank.worldbank.org/data/databases/budgetary-central-government>
- Jenkins, Glenn P., Chun Yan Kuo, and Gangadhar P Shukla. 2000. *Tax Analysis and Revenue. Forecasting, Issues and Techniques*. Harvard Institute for International Development.
- Prasetyo, Danang Dwi, Moh. Adenan, dan Aisah Jumiati. 2016. Analisis Determinasi Foreign Direct Investment di ASEAN-5 Tahun 2005-2014. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Universitas Jember.
- Romer, Paul M. 1986. Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy* 94(5):1002-1037.
- Sanjaya, A. Yudha. 2014. Empirical Study of Tax buoyancy and The Determinants in Indonesia. Tesis. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Sidik, Manchud. 2002. Desentralisasi Fiskal : Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Disampaikan pada Seminar Nasional "Menciptakan Good Governance demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal". Yogyakarta : 20 April.
- Sjafri, Rika Sari. 2006. Analisis Tentang Penerimaan Pajak Sebagai Fungsi dari Produk Domestik Bruto Kaitanya dengan Tax Buoyancy dan Elastisitas Pajak di Indonesia. Tesis Dipublikasikan. Universitas Indonesia.
- Widjaya, Annisa Gama. 2008. Studi Evaluasi Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008 dan implikasinya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Semarang di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Janteng 1. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- World Bank. 2018. World Development Indicator. Diakses 20 Agustus 2018, dari <http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators#>
- World Economic Forum. 2014. *The Global Competitiveness Report 2014-2015*, Geneva.
- World Economic Forum. 2015. *The Global Competitiveness Report 2015-2016*, Geneva.
- World Economic Forum. 2016. *The Global Competitiveness Report 2016-2017*, Geneva.
- World Economic Forum. 2017. *The Global Competitiveness Report 2017-2018*, Geneva.